

MUKTAMAR 2015 DAN POLITIK NU DALAM SEJARAH KENEGARAAN

*Oleh: Moh. Rosyid
Dosen STAIN Kudus*

Abstract

NU and its followers is a national asset that needs to be affirmed by the state. Since its establishment, NU has colored the journey of the nation. This is confirmed by the number of NU figures who became national heroes, public officials and others. However, as mass organization, NU finds difficulties to contribute in politics, so they look back to the 1926 khittah. As one of Muslim organization, NU is expected to respect and care for others including their opponents. NU Mukhtamar in Jombang, East Java August 2015 showed the political dynamics within NU, between two groups: proponents of Ahlul halli wal aqdi (AHWA) and its opponents.

Keywords: *politics, NU, dynamics*

A. Pendahuluan

Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Puncak Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-85 Nahdlatul Ulama (NU) di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Ahad 17 Juli 2011 menilai, NU memiliki reputasi baik dalam sejarah perjuangan bangsa dan tak pernah berbuat onar apalagi memberontak. Presiden mengaku senang NU akan terus bekerja sama dan berdampingan dengan pemerintah, menghargai sikap NU yang secara jelas antikekerasan, antiterorisme, dan antiseparatisme. Hal ini sangat diperlukan agar Indonesia tetap dapat menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah dari berbagai ancaman, termasuk separatisme. Presiden mengajak jamaah NU untuk tetap menggalang persatuan dan kesatuan bukan perpecahan. Di saat pidato pada acara yang sama, Ketua Umum PB NU, Said Aqil Siraj menyatakan bahwa NU mendukung jalannya roda pemerintahan Presiden SBY. Namun dukungan itu diberikan sejauh pemerintahannya menjalankan program prorakyat. Jika tidak prorakyat, akan kita koreksi. NU komitmen untuk tetap menjaga empat pilar Negara (Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan

Bhinneka Tunggal Ika). Potensi NU pada taraf nasional secara garis besar memiliki lembaga pendidikan dan kesehatan serta jaringan kepengurusan. Pesantren NU secara nasional berjumlah 26 ribu, madrasah dan sekolah sebanyak 12 ribu, dan perguruan tinggi sebanyak 81 lembaga, adapun rumah sakit sebanyak 214 buah. Sedangkan jaringan kepengurusan terdiri 31 pengurus wilayah (provinsi), 339 pengurus cabang (kabupaten/kota), 12 pengurus cabang istimewa (luar negeri), 2.630 majelis wakil cabang (kecamatan), 37.125 pengurus ranting (kelurahan/desa) dengan anggota dan simpatisan diprediksi sebanyak 60 juta jiwa (*Jawa Pos*, 18 Juli 2011, hlm.2).

Data Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2013, jumlah warga NU (nahdliyin) sebanyak 86,4 juta orang. Ikatan penopang kekuatan utama NU dari dunia pesantren. Jaringan NU di 31 pengurus wilayah/PW (tingkat provinsi), 339 pengurus cabang/PC (tingkat kabupaten), 12 pengurus cabang istimewa/PCI (luar negeri), ada 2.630 majelis wakil cabang/MWC (tingkat kecamatan), 37.125 pengurus ranting (tingkat desa/kelurahan). Badan di bawah naungan NU (Badan otonom/Banom) terdiri muslimat/anggota perempuan, fatayat/perempuan muda, Gerakan Pemuda (GP) Ansor, anggota lelaki muda maksimal 40 tahun, Ikatan Pemuda NU (IPNU) untuk pelajar dan santri laki-laki maksimal berusia 30 tahun, Ikatan Putra-Putri NU (IPPNU) untuk pelajar putri dan santriwati maksimal berusia 30 tahun.

Pada jumpa pers menjelang Kongres Umat Islam (KUI) ke-6 di Yogyakarta 8-11 Februari 2015, Wakil Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin menyatakan, sejak awal pembentukan Negara Indonesia, Islam merupakan salah satu sarana pemersatu bangsa dan tetap menunjang tradisi Nusantara. Setelah kemerdekaan sampai sekarang, umat Islam perlu didorong untuk terus menjadi bagian dalam kemajuan sosial, ekonomi, dan politik. Kita harus mencari permasalahan serta hal-hal yang hilang dalam kontribusi umat Islam terhadap kesejahteraan dan persatuan Indonesia. Kebutuhan negara dan umat Islam bisa dipertemukan agar kepentingan umat tidak terkesan dipinggirkan. Jika timbul kesan negatif, bakal memicu anggapan negara dan umat Islam tidak jalan. Hal ini mengancam persatuan (*Kompas*, 9 Januari 2015).

Munas ulama yang dibuka Presiden Jokowi Minggu 14

Juni 2015 di Masjid Istiqlal Jakarta juga menghasilkan kesepakatan tentang materi keagamaan yang akan dibahas dalam Mukhtamar Ke-33 NU yang digelar di Jombang Jawa Timur 1-5 Agustus 2015. Jokowi dalam sambutannya berpesan NU diharapkan tetap melanjutkan jejak sejarahnya, yaitu menempatkan diri sebagai tiang penyangga RI berdasarkan Pancasila, menjaga wajah Islam Nusantara yang toleran, santun, dan memegang teguh akhlak. NU diminta turut serta menjawab tantangan bangsa. Munas dilaksanakan bersamaan dengan istighosah menyambut Ramadan 1436 H/2015 M. Dalam sambutannya, Ketua umum PB NU K.H Said Aqil Siroj mengusulkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Pasalnya, 22 Oktober 1945 merupakan tanggal para santri bangkit melawan tentara NICA di bawah pimpinan Brigjen AWS Mallaby. Mobil Mallaby ditaruh bom oleh santri ponpes Tebuireng, Harun. Jokowi merespon bahwa pemerintah belum menetapkan Hari Santri karena banyaknya usulan tanggal Hari Santri. Presiden menginstruksikan Menag untuk segera bermusyawarah merumuskan Hari Santri (*Kompas*, 15 Juni 2015).

Terdapat hal yang menarik tatkala Rais Aam Pengurus Besar NU KH A Mustofa Bisri saat memberikan *khotbah iftitah* (pidato pembukaan) Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Kantor PBNU Jakarta Sabtu 1 November 2014. Gus Mus (Musthofa Bisri) meminta pada pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla hendaknya dapat memberikan tauladan kepada rakyatnya tentang kesederhanaan. Sikap kesederhanaan yang telah ditunjukkan Presiden hendaknya menjangar ke seluruh jajaran pemerintahan. Tren penguasa yang disenangi rakyat saat ini adalah mereka yang mau bekerja dan melayani serta bersikap sederhana dan merakyat. Gus Mus pun mengajak kepada semua kiai NU yang sempat berbeda pilihan dalam pilpres untuk mendukung pemerintah sepanjang mereka bekerja untuk kepentingan bangsa Indonesia dan kiai tetap bersikap kritis. Para pemimpin yang semula bersaing perlu menunjukkan sikap kenegarawanan. Mudah-mudahan, warga NU, khususnya para kiai yang terlibat dukung-mendukung dapat mencerdasi sikap kenegarawanan para pemimpin sehingga tak ada lagi istilah berseberangan di antara kita (*Kompas*, 2 November 2014).

Hal yang dibahas dalam Munas dalam acara *bahtsul masail* antara lain pandangan NU tentang *khilafah* atau kepemimpinan umat. Rekomendasi Munas, *khilafah* yang disetujui NU adalah kepemimpinan yang bernuansa nasionalisme kebangsaan, bukan model khilafah global. NKRI sebagai hasil kesepakatan pendiri bangsa, termasuk para ulama, adalah bentuk final bangsa ini yang harus terus dipertahankan. Ijtihad politik ini sesuai dengan spirit kekhalifahan Islam yang dibingkai dalam bentuk negara-bangsa modern yang mengayomi warga dari beragam suku, bangsa, dan agama. Kekhalifahan merupakan gagasan Islami. Namun, menurut Said Aqil Siroj, Ketum PBNU, dalam konteks kehidupan modern, ide itu perlu diterjemahkan sebagai kepemimpinan nasional yang dipilih lewat sistem demokratis seperti berlangsung di Indonesia sekarang. Istilah '*khilafah*' dari bahasa Arab yang berarti kekuasaan yang mewakili rakyat. Dulu, Abu Bakar disebut '*khalifah*' sebagai pengganti Nabi SAW yang wafat. Dalam kehidupan modern, presiden bisa disebut khalifah karena mewakili kedaulatan rakyat.

Narasumber dalam *bahtsul masail* yakni Rois Syuriah PBNU, Masdar Farid Mas'udi mengungkapkan, khalifah merupakan konsep kepemimpinan yang memberikan mandat kepada seseorang terpilih untuk memimpin umat. Pemimpin itu disebut '*khalifah*' dia menjadi pengganti Tuhan untuk memimpin umat manusia. Sebagai khalifah, pemimpin memiliki tanggung jawab kepada Tuhan dengan menjalankan moral baik sekaligus kepada rakyat dengan memimpin secara adil dan menyejahterakan umat. NKRI merupakan perwujudan spirit kekhalifahan karena presiden bertanggung jawab kepada Tuhan dan rakyat (*Kompas*, 3 November 2014). Munas juga membahas konsep *ahlul halli wal aqdi* sebagai metode pemilihan Rais Aam di internal PBNU, kode etik penyiaran agama, negara dalam perspektif aswaja, dan aborsi. Terbitnya PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi pada salah satu pasal memperbolehkan aborsi. Hal ini menjadi bahan pembahasan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU, Sabtu dan Minggu 1 dan 2 Oktober 2014 di Jakarta. Dalih diperbolehkannya aborsi karena kedaruratan medis dan akibat perkosaan, bagaimana Islam menghukuminya. Hal ini dibahas komisi *bahtsul masail* (pembahasan masalah-masalah) untuk

mencari solusi di antaranya revisi KUHP ke MK perihal aborsi dan menghasilkan rekomendasi agar keresahan masyarakat tidak berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan ilmu fikih. Kitab salaf yang dijadikan rujukan yakni *Tuhfatul Muhtaj*, *Nihayatul Muhtaj*, *Bughyatul Mustarsyidin*, *Hasyiyah Raddul Muhtar*, dan *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Masalah diperbolehkannya aborsi karena adanya pro-kontra di tengah masyarakat.

Kasus kehamilan tidak diinginkan kian menguat. Kasus terbesar terjadi pada anak dengan usia rata-rata 17 tahun. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, jumlah kehamilan tak diinginkan pada anak dengan rentang usia sekitar 10 tahun mencapai 240.000 kasus atau 4,8 persen dari 5 juta kelahiran per tahun. Kasus kebanyakan menimpa anak di jenjang pendidikan sekolah dasar. Data Kemensos, kasus kehamilan tidak diinginkan terbanyak terjadi pada umur 17 tahun. Jumlahnya mencapai 2,09 juta atau sekitar 41,8 persen dari rata-rata jumlah kelahiran 5 juta per tahun di Indonesia. Kehamilan tidak diinginkan akan melahirkan anak yang tidak diinginkan (*Kompas*, 9 Januari 2015). Dengan paparan tersebut menandakan bahwa NU memiliki hubungan erat dan dibutuhkan kiprah organisasinya bagi Negara dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik yang diwujudkan dalam pelaksanaan program kerja NU.

Hal pokok yang ditelaah dalam naskah ini meliputi NU dan perpolitikan nasional, konsep syariat Islam, pahlawan dalam NU, NU dan politik toleransi.

B. Landasan Teori

1. Mukhtamar

Titel mulia disematkan bagi tokoh dengan sebutan ragam. Dalam tubuh NU, judul tersebut dengan julukan kiai. Ada yang menafsiri bahwa kata 'kiai' berasal dari bahasa Tiongkok dari kata 'kiya' yang berarti jalan, dan 'i' berarti lurus. Dengan demikian, judul kiai merupakan sebutan agung yang berimbas terhadap setiap apa yang diucapkan dan dilakukan dengan baik. Hal tersebut menandakan bahwa figur kiai sejati sebagai sosok ideal.

Kajian ini di antaranya mengulas kegiatan mukhtamar NU ke-33 di Jombang Jawa Timur. Mukhtamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi di NU. Forum membicarakan arah

Muktamar 2015 dan Politik NU dalam Sejarah Kenegaraan

dan kebijakan strategis organisasi, termasuk pemilihan pengurus. Muktamar I di Surabaya 21-23 September 1926 yang diikuti 93 ulama dari Jawa dan Madura ditambah KH Abdullah dari Palembang, KH Abu Bakar dari Kalimantan, dan KH Abdul Qadir dari Martapura. Muktamar selanjutnya di Semarang (1929), di Pekalongan (1930), Cirebon (1931), Bandung (1932), Jakarta (1933), Banyuwangi (1934), Solo (1935), Banjarmasin (1936), Malang (1937), Banten (1938), Magelang (1939), Surabaya (1940). Pada 1941 muktamar direncanakan di Palembang, tetapi karena Perang Asia Pasifik maka ditiadakan. Pada tahun 1946 muktamar setelah kemerdekaan di Purwokerto, di Madiun pada 1947, di Jakarta tahun 1950, di Palembang tahun 1952, di Surabaya tahun 1954, di Medan tahun 1956, di Solo tahun 1959 dan 1962, di Bandung tahun 1967, tahun 1971, muktamar ke-26 di Semarang tahun 1979 NU kembali ke khittah 1926, di Situbondo tahun 1984, di Yogyakarta tahun 1989, di Tasikmalaya tahun 1994, di Kediri tahun 1999, di Boyolali tahun 2004, di Makassar tahun 2010, dan Jombang 2015.

2. Profil Pemimpin NU

Jabatan Rais Aam PBNU pernah dijabat oleh Hasyim Asy'ari (1926-1947), Abdul Wahab Chasbullah (1947-1971), Bisri Syansuri (1972-1980), M.Ali Maksum (1980-1984), M. Hasan Siddiq (1984-1991), Ali Yafie (1991-1992), M. Ilyas Ruhiat (1992-1999), M. Ahmad Sahal Mahfudz (1999-2014), wafat Januari 2014 sehingga Pjs-nya Musthofa Bisri (2014-2015). Jabatan Rais Syuriah PBNU pernah dijabat oleh Hasan Gipo (1926-1952), Idham Chalid (1952-1984), Abdurrahman Wahid (1984-1999), Hasyim Muzadi (1999-2010), dan Said Aqil Siraj (2010-2015).

Periode	Ketua Umum PBNU	Rais Aam NU
1926	Hasan Gipo	Hasyim Asyari
1952-1954	Masjkur, diangkat menjadi Menag, diganti Wahid	Abdul Wahab Chasbullah
1954-1956	Hasyim	Abdul Wahab Chasbullah
1956-1959	M.Dachlan	Abdul Wahab Chasbullah
1959-1962	Idham Cholid	Abdul Wahab Chasbullah

1962-1967	Idham Cholid	Abdul Wahab
1967-1971	Idham Cholid	Chasbullah
1971-1979	Idham Cholid	Abdul Wahab
1979-1984	Idham Cholid	Chasbullah
1984-1989	Abdurrahman Wahid	Abdul Wahab
1989-1994	Abdurrahman Wahid	Chasbullah
1994-1999	Abdurrahman Wahid	Abdul Wahab
1999-2004	Hasyim Muzadi	Chasbullah
2004-2009	Hasyim Muzadi	Bisri Syansuri
2010-2015	Said Aqil Siraj	Achmad Siddiq
		Achmad Siddiq
2015-2020	Said Aqil Siraj	Ilyas Ruhiat
		Sahal Makhfudz
		Sahal Makhfudz
		Sahal Makhfudz (Januari
		2014 wafat) diganti
		Mustofa Bisri
		Makruf Amin

3. Konsep *Ahlul Halli wal Aqdi*

Sistem *Ahlul Halli wal Aqdi* (Ahwa) pertama kali muncul pada akhir pemerintahan Umar bin Khattab. Setelah Umar sakit karena tusukan pedang beracun oleh budak dari Persia, para sahabat mengusulkan pada Umar agar menunjuk pengganti. Umar menunjuk enam orang yakni Utsman bin Affan, Ali bin Abi Tholib, Tholhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Abdurrahman bin Auf. Keenamnya sebagai Ahwa pertama dalam Islam. Umar tidak menunjuk Saad bin Zaid karena dari kubu/kabilah Umar, tidak menunjuk Abdullah bin Umar karena putranya, agar fair dalam pemilihan. Setelah Umar bin Khattab wafat, keenam sahabat tersebut bermusyawarah selama tiga hari. Kandidat pengganti Umar bin Khattab mengerucut tiga nama calon, yakni Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman melepas haknya dan memilih sebagai penengah dengan mengajak Ali dan Utsman berbicara bersama untuk menentukan sikap dengan mendengar aspirasi publik. Akhirnya, Utsman terpilih sebagai pengganti Umar untuk menduduki khalifah. Setelah keempat khalifah, Ahwa tidak terlaksana karena sistem

Muktamar 2015 dan Politik NU dalam Sejarah Kenegaraan

pemerintahan monarkhi (kerajaan). Sistem monarkhi kembali terulang sebagaimana era Menes masa Mesir sejak tahun 3400 SM dengan monarkhi absolut bergelar Fir'aun.

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU Senin 15 Juni 2015 memutuskan mengubah mekanisme pemilihan Rais Aam Syuriah atau Ketua Umum Dewan Syuro PBNU bahwa pemilihan tidak lagi dengan suara terbanyak atau voting. Akan tapi musyawarah mufakat oleh *ahlul halli wal aqdi* (ahwa). Ahwa secara harfiah berarti orang yang berwenang melepaskan dan mengikat. Ahli diberi makna institusi khusus yang berfungsi untuk mengambil keputusan. Tahapannya, tiap pengurus NU tingkat provinsi (pengurus wilayah) dan pengurus tingkat cabang (pengurus kabupaten/kota) mengusulkan 9 nama yang ditempatkan di ahwa. Sembilan nama yang paling banyak diusulkan otomatis menjadi ahwa. Ahwa itulah yang memilih Rais Aam Syuriah NU dalam musyawarah/muktamar NU di Jombang Jawa Timur 1-5 Agustus 2015. Kriteria yang dipilih menjadi ahwa adalah mampu bersikap adil, berilmu atau memiliki wawasan keagamaan yang luas, memiliki integritas moral, berpengaruh, serta memiliki kemampuan memimpin, dan memiliki akidah *ahlussunnah wal jamaah*.

Format Ahwa dianggap bisa menghindari keburukan dalam proses pemilihan dibandingkan dengan voting. Sebelumnya, penggunaan format musyawarah telah disetujui dalam Munas PBNU di Jakarta Juni 2015. Hal ini belajar dari muktamar ke-32 di Makassar yang menggunakan voting sehingga proses pemilihan Rais Aam kental dengan nuansa pilkada. Pada tahun 2012 PWNU Jawa Timur akan menerapkan model Ahwa dalam konferensi wilayah, tetapi belum ada payung hukum yang memadai, PBNU meminta menundanya. Pada Rapat Pleno ke-2 PBNU di Wonosobo, 6-8 September 2013, Rais Aam KH Sahal Makhfud memerintahkan PBNU memproses gagasan Ahwa. Harapannya, menjadi aturan yang dapat diterapkan dalam pemilihan pemimpin di seluruh jajaran kepengurusan NU. Dibentuklah tim khusus yang dipimpin KH Masdar Farid Mas'udi (Rais Syuriah PBNU), Abdul Mun'im DZ (Wasekjen PBNU) yang menghasilkan naskah komprehensif tentang model Ahwa.

PBNU diprotes sejumlah pimpinan daerah karena

dianggap memaksakan memutuskan metode ahwa dalam pemilihan Rais Am (pemimpin tertinggi NU) periode 2015-2020 dalam Mukhtamar NU ke-33 pada 1-5 Agustus 2015. Ahwa dianggap oleh sebagian muktamirin bertentangan dengan peraturan dasar organisasi. Menurut Rais Syuriah PWNU Nusa Tenggara Timur, Abd Kadir Makarim bahwa Ahwa sudah didiskusikan dalam forum pramuktamar di Lombok, Makassar, dan Medan, sebagian PWNU dan PCNU menolak. Rais Am PWNU Sulawesi Tengah K.H Jamaluddin Mariajang menilai, PBNU melanggar AD/ART. Sebab, sebelum muktamar, PBNU sudah memprovokasi dan memaksakan sistem Ahwa. PBNU melanggar AD/ART karena hingga kini kita masih memakai AD/ART hasil muktamar yang lalu. Munas tidak bisa menggantikan Mukhtamar. Menurut Rais Am PWNU Lampung K.H Ngaliman, Keputusan Munas tentang Ahwa harus dicabut karena tidak dihasilkan dari proses yang benar. Forum Munas terkesan dipaksakan dan peserta tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pendapat (*Suara Merdeka*, 20 Juni 2015).

C. Pembahasan

1. NU dan Sinergi Politik

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan didirikan para ulama bermodal tekad dan kesadaran untuk membangun bangsa yang majemuk. Di sisi lain, gerakan wahabi yang ingin memurnikan Islam, yakni menafikan peran budaya lokal sehingga gerakan wahabi sering berbenturan dengan tradisi lokal yang ditradisikan NU yakni Islam Nusantara, Islam Indonesia, bukan Islam di Indonesia. Kelahiran NU yang embrionya sejak 1916 dibangun atas dasar spirit *nahdlatul wathan* atau gerakan kebangsaan/nasionalisme dan *nahdlatut tujjar* atau gerakan perdagangan untuk memberdayakan ekonomi umat. Sebelumnya, para ulama penggagas berdirinya NU, tahun 1926 membentuk Komite Hijaz untuk diberangkatkan ke Arab Saudi, yang waktu itu akan menjadikan mazhab Wahabi serta menghancurkan semua peninggalan sejarah. Termasuk memindahkan makam Nabi SAW dari kawasan Masjid Nabawi. Komite Hijaz, gabungan dari *Tashwirul Afkar*, *Nahdlatul Wathan*, dan *Syubbanul Wathan* (Pemuda Tanah Air) terdiri atas sejumlah

kiai karismatik, yakni KH Hasyim Asy'ari (Jombang), KH Abdul Wahab Chasbullah (Surabaya), KH Bisyrri Syansuri (Jombang), KH Raden Asnawi (Kudus), KH Nawawi (Pasuruan), KH Nachrowi (Malang), dan KH Alwi Abdul Aziz (Surabaya). Dalam pertemuan di rumah KH Wahab, Komite Hijaz merekomendasikan, pertama, mengirim delegasi ke Kongres Dunia Islam di Makkah guna memperjuangkan kepada Raja Ibnu Saud supaya mazhab empat sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) mendapat perlindungan dan kebebasan. Kedua, membentuk jamiyah NU untuk menegakkan syariat Islam yang berhaluan salah satu dari 4 mazhab tersebut dan jam'iyah disusun dengan kepengurusan syuriah dan tanfidziyah. Misi Komite Hijaz sukses karena Raja Saud merespon positif. Andaikata misi tersebut gagal, boleh jadi keberadaan 4 mazhab dalam konteks kini menjadi barang langka.

Berbekal prinsip aswaja (*ahlussunnah wal jamaah*) bagi NU yakni adil, toleran, moderat, dan seimbang untuk kemaslahatan bersama, embrio konflik perlu disikapi dengan bijak. Pada awal berdirinya bidang garapan utama NU dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik. Pada era kolonial, memobilisasi perlawanan fisik terhadap kekuatan penjajah melalui Resolusi Jihad.

Sikap bijak perlu ditopang dengan 'pemenangan' kompetisi meraih tujuan utama organisasi, sehingga ulama NU tertarik pada lembaga yang berwenang membuat perundangan dan duduk di kursi eksekutif. Menurut Abdul Halim, secara garis besar, pola hubungan Islam dan politik terangkum dalam dua spektrum pemikiran yaitu organik dan non-organik. Spektrum organik mengatakan bahwa Islam dan politik tidak dapat dipisahkan karena keduanya secara struktural terikat oleh sistem religius yang formal. Islam merupakan agama yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan, termasuk persoalan politik. Spektrum non-organik berpandangan bahwa Islam tidak memiliki suatu pola baku tentang teori politik dan negara (Islam). Bahkan, dalam al-Quran tak dikenal istilah negara (*daulah*). Al-Quran merupakan kitab suci, bukan kitab politik (2014: 2). Menurut Qodir, dalam konteks politik Islam di Indonesia, ada tiga mazhab dalam persoalan politik dan Islam, yakni formalisme Islam (menghendaki adanya dasar Islam di

Indonesia), substansialisme Islam (Negara tidak perlu secara resmi menjadi negara Islam tapi lebih pada etika Islam memberi sumbangan pada peran kenegaraan, dan sekularisme Islam (memisahkan antara Islam dengan masalah kenegaraan) (2012: 8).

Dalam realitasnya, berpolitik menjadi keharusan (saat itu) bahwa manusia tak akan pernah melepaskan 'jeratan' politik (*zoon politicon*). Upaya riil dilakukan K.H Hasyim Asy'ari pada tahun 1937 membentuk Gabungan Politik Indonesia yang salah satu agendanya mendorong bangsa Indonesia berparlemen. Pada 7 November 1945 NU bergabung dengan Partai Masyumi sebagai hasil kesepakatan bahwa Masyumi sebagai satu-satunya alat perjuangan umat Islam. Akan tetapi, pada 5 April 1952 NU hengkang dari Masyumi untuk mendirikan Partai Nahdlatul Ulama atau Partai NU. Pada Pemilu 1955, NU mendapat urutan ketiga perolehan suara pemilu sebanyak 6,9 juta suara (18,4 persen). Pada 1960 Partai NU menjad salah satu parpol yang selamat dari kebijakan penyederhanaan partai yang dilakukan Presiden Soekarno. Partai NU pada pemilu pertama era Orba tahun 1971 menduduki posisi kedua setelah Golkar.

Kiprah politik NU dianggap membahayakan Orde Baru sehingga Januari 1973 partai NU dikerdilkan oleh Orba dan disatukan dalam satu wadah yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan lintas partai Islam. Relasi NU dengan PPP tidak harmonis sehingga NU hengkang dari gelanggang parpol untuk kembali ke khittab 1926 berdasarkan Mukhtamar ke-27 pada 8-12 Desember 1984. Hal ini dilatarbelakangi adanya nafsu politik yang menyimpan persoalan karena tujuan utama NU didirikan yakni membangun tatanan sosial keagamaan umat tapi sering terabaikan dan dalam berpolitik identik dengan kompetisi/perseteruan yang mengarah pada kehancuran berbangsa.

Pada tahun 1977-1997 aspirasi politik NU diperjuangkan melalui PPP. Pada 1984 Gus Dur terpilih sebagai Ketum PBNU dan menyatakan NU keluar dari PPP yakni gerakan untuk kembali ke khittah 1926 setelah NU melang-lang buana 1926-1952. Pada 1989 Gus Dur terpilih lagi sebagai Ketum PBNU yang kritis terhadap Orba. Pada 1998 sejumlah tokoh NU mendirikan Partai Kebangkitan bangsa (PKB). Pada 1999 PKB menjadi

pemenang ketiga pemilu (12,6 persen) setelah PDI-P dan Golkar. Pada 2000-2001 Gus Dur terpilih menjadi Presiden RI. Akan tetapi, gonjang-ganjing di tubuh PKB sehingga sebagian kader PKB mendirikan Partai Keangkitan Nahdlatul Ulama (PKNU). Imbasnya, tahun 2009 perolehan suara PKB hanya 4,9 persen.

Hikmah berkhittah, tokoh NU mampu hidup di lintas partai seperti PPP, PKB, PKNU, PKS dan lainnya yang sejalur dengan credo 'NU tidak ke mana-mana tapi ada di mana-mana' dan tidak anti-politik. Problem yang pelik, berpolitik identik dengan *money politic*, tidak hanya ongkos politik, dan tidak cukup mengandalkan idealisme dan nama besar sosok. Lantas, apa yang harus dilakukan (calon) politisi atau politisi NU dalam menyikapinya? Suara rakyat adalah suara Tuhan telah melebur menjadi 'suara rakyat akan terdulang bila ada uang' merupakan persoalan krusial yang harus dipecahkan. Mengapa? Rakyat pemilih telah mafhum bahwa siapa yang menduduki kursi penguasa politik diidentikkan dengan memperkaya diri, keluarga, trah, dan partai dengan bukti banyaknya penghuni sel penjara oleh politisi atau pejabat politik sehingga yang terjadi adalah transaksi, bukan idealisasi politik. Karakter politisi yang korup tersebut bertolak belakang dengan fitrah kehidupan.

Ketua PWNU Jateng meminta parpol Islam memertahankan asas Islam, terutama partai berasas *ahli sunah wal jamaah* (Aswaja). Hal ini dinyatakan Abu Hafsin pada Harlah PPP ke-41 di Kantor PPP Kabupaten Kudus Ahad 23 Februari 2014. NU sebagai organisasi dakwah didirikan 31 Januari 1926 berhaluan Aswaja. Istilah lain Aswaja: *ahlu hadits*, *ahlu atsar*, *ahlu ittiba*, *ath thaufah al-manshurah* (kelompok jalan benar), *al firqathun najiyah* (kelompok yang selamat). Aswaja mengacu kelompok suni (Syiah, Muktazilah, dan Murji'ah dianggap non-suni oleh sebagian pihak). Istilah Aswaja dipopulerkan Abu Sirin, istilah makin populer pascaterbunuhnya Ali bin Abi Thalib karena umat Islam melakukan *bid'ah* (aktivitas yang tak diajarkan oleh Nabi SAW) sehingga dibedakan antara ahli *bid'ah* dengan ahli sunah. Aswaja berpola pikir (1) *ahlur ra'yi* (lebih banyak menggunakan akal dalam ijtihad). Imam Abu Hanifah mendasarkan ajaran Quran, hadis, ijmak, qiyas, dan istihsan. Hanafiyah berkembang di Turki, Afghanistan, Mesir, Asia Tengah, Pakistan, India, Irak, Brazil, Amerika Latin, (2) *ahlul hadis* lebih banyak menggunakan

hadis dalam menetapkan hukum Islam daripada akal, seperti rujukan imam mazhab (Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi). Mazhab Maliki (pengikut Imam Malik bin Anas) berkembang di Afrika Utara, Mesir, Sudan, Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Mazhab Syafi'i (pengikut Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i) berkembang di Mesir, Suriah, Pakistan, Arab Saudi, India Selatan, Thailand, Malaysia, Brunai Darussalam, Filipina, dan Indonesia. Mazhab Hambali berkembang di Arab Saudi, Suriah, dan beberapa negara Afrika. Mazhab Hanafi berkembang di Spanyol meski kian nipis. Dinamika Aswaja di Nusantara dipengaruhi karya ulama yang terbit pada abad ke-17 sebagaimana Nuruddin Ar-Raniri (kitab fikih lengkap pertama berbahasa Melayu), Abdul Rauf Singkel (tafsir 30 juz berbahasa Melayu), Muhamad Yusuf al-Makassari. Pada abad ke-18 dimotori Abdus Shamad al-Palembani, Muhamad Nafis al-Banjari. Abad ke-19 tampilnya Nawawi al-Bantani dan Ahmad Khatib al-Minangkabawi, keduanya belajar di Makkah dan Madinah. Perkembangan Aswaja di Indonesia, khususnya di Jawa ditopang walisongo. Kaum Suni Indonesia berprinsip keagamaan sebagai dasar pemahaman yang tak menafikan tradisi. Bidang teologi beraliran Asy'ariyah dan bermazhab fikih empat yang memrioritaskan mazhab Syafi'i karena lebih fleksibel.

NU mengusung konsep Islam mengedepankan nilai kedamaian, harmoni (keselarasan), dan kasih sayang (rahmat) yang menghadapi dinamika perbedaan aliran, paham, dan agama. Warga NU idealnya menjadi pionir aksi jalan tengah (toleran) antara ekstrim *'aqli* (rasionalis) dan ekstrim *naqli* (skripturalis). Laku geraknya bersumber dari Quran, hadis, dan daya nalar (*ijmak-qiyas*). Pola pikirnya berprinsip (1) *al-tawassuth* (moderat) tak ekstrim (liberalis-kiri/fundamentalis-kanan). Tak anti-konsep bernegara seperti asas teokrasi (ketuhanan), aristokrasi (kerajaan), demokrasi (kerakyatan) atau lainnya. Hal itu bila memenuhi aspek *syura* (musyawarah), *al-'adl* (keadilan), *al-muSAWah* (kesetaraan derajat), dan *al-hurriyyah* (kebebasan) dengan menjaga lima prinsip asasi manusia (*al-ushulul khamsah*), (2) *at-tawazzun*; seimbang dalam penerapan kaidah, teks, rasio, dan realitas, (3) *al-i'tidal* (tegak lurus) atau tak mudah terprovokasi, dan (4) *at-tasamuh* (menjunjung tinggi sikap toleran) (Rosyid, 2014).

Muktamar 2015 dan Politik NU dalam Sejarah Kenegaraan

Konsekuensinya warga NU harus mewujudkan *Ahlu as-Sunnah* (berperilaku sebagaimana Nabi SAW, sahabat dan *tabi'in* (pengikut sahabat) di atas kebenaran. Dalam interaksi antar-umat beragama, nahdliyin harus berpegang pada produk pemerintah secara utuh. Sebagaimana pemahaman terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag dan Mendagri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 khususnya tentang pendirian rumah ibadat. Pada Bab IV secara garis besar dinyatakan, pendirian tempat ibadat didasarkan atas keperluan nyata, menjaga kerukunan umat, tak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, memenuhi persyaratan administrasi. Pasal 14 daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat minimal 90 orang, dukungan warga setempat minimal 60 orang. Keduanya disahkan oleh lurah/kepala desa dan rekom tertulis FKUB kab/kota. Bila tak ada dukungan masyarakat setempat (60 orang), Pemda berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. Peran Pemda selama ini belum riil dalam mengayomi yang minoritas. Begitu sulitnya muslimin mendirikan masjid/musala di NTT, Papua, Bali, dll. Kesulitan ini terimbas dari sulitnya umat minoritas di wilayah umat mayoritas dalam membangun tempat ibadah. NU sebagai organisasi sosial keagamaan, memiliki 'taring' untuk mengayomi minoritas di mana pun berada karena berpegang pada prinsip *al-tawassuth, at-tawazzun, al-i'tidal, dan at-tasamuh*.

NU lahir pada 31 Januari 1926 sejak awal kemerdekaan, sikapnya mendukung pemerintahan Presiden Soekarno. Hal ini bisa dilihat dalam hasil Mukatamar ke-20 NU di Surabaya, 8-13 September 1945 yang memutuskan Presiden Soekarno sebagai *waliy al-amri al-dlaruri bi al-syawkah* atau pemegang pemerintahan dengan kekuasaan penuh. Keputusan diawali upaya menggulingkan Soekarno dan mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan menyatukan para nahdliyin (warga NU) dalam mendukung pemerintahan Indonesia. Imbas kelanjutannya, dalam penutupan Mukatamar NU ke-23 di Solo pada 1962, Soekarno menyatakan, NU mempunyai kontribusi besar dalam keberhasilan Indonesia merebut Irian Barat (Papua) dari Belanda. Keberhasilan NU tersebut diawali peran Rais Aam PBNU, K.H Wahab Hasbullah menyarankan perebutan Irian Barat dengan Diplomasi Cancut Tali Wondo.

Pada perjalanan pembangunan bangsa, NU dalam Mukatamar ke-27 pada 8-12 Desember 1984 menghasilkan dua keputusan, pertama, menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas. Kedua, mengembalikan NU menjadi organisasi sosial keagamaan sesuai dengan khittah NU 1926. Dengan keputusan ini, NU melepaskan diri dari keterlibatan politik praktis. Rais Aam Syuriah PBNU tahun 1984-1991 K.H Achmad Shiddiq menyatakan, Pancasila merupakan bentuk final perjuangan Islam di Indonesia.

Pada Rapat Akbar NU 1 Maret 1992 menghasilkan komitmen warga NU untuk meneguhkan kehidupan kebangsaan dengan pelaksanaan UUD secara baik dan benar. Pada 18 Maret 2012 NU membentuk Laskar Aswaja untuk merespons keresahan atas radikalisme berbasis agama. Laskar dibentuk sebagai penjaga utama *Ahlussunnah wal Jamaah* (Aswaja) dan untuk membentengi ideologi transnasional yang tidak sesuai konteks keindonesiaan dan menolak radikalisme berbasis agama. Menurut Umar, teologi Aswaja yang menjadi pijakan komunitas warga NU memberikan pengaruh sekaligus kontribusi amat penting di dalam penemuan dan penguatan pilar Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Aswaja berteologi inklusif, memiliki cara pandang sendiri yang dikenal *fikrah nahdliyyah* yang mengacu pada prinsip moderat (*tawasuthiyyah*), toleran (*tasamuiyyah*), reformis (*ishlahiyyah*), dinamis (*tathawuriyyah*), dan metodologis (*manhajiyyyah*) sebagai ciri khas warga NU dalam mengukur dan menyelesaikan setiap persoalan. Konsep itu melahirkan etika dan fikih kebangsaan (*fiqh wathaniyyah*) yang produknya antara lain trilogi ukhuwah, yaitu ukhuwah basyariyyah (persaudaraan kemanusiaan), *ukhuwah wathaniyyah* (persaudaraan kebangsaan), dan *ukhuwah islamiyyah* (persaudaraan keislaman). Konsep trilogi ukhuwah ini menenggelamkan tiga konsep kenegaraan dalam fikih Islam klasik yakni *dar al-Islam* (negara Islam), *dar al-Harb* (negara musuh), dan *dar al-Shulh* (negara non-Islam tapi menjalin hubungan damai). NU membuktikan universalitas Islam yang diterapkan tanpa menyingkirkan budaya lokal. Syariat Islam dapat diimplementasikan tanpa harus menginstitutionalisasi formal. Wawasannya multikultural bahwa kebijakan sosialnya bukan melindungi tradisi atau budaya setempat, tapi mengakui

Muktamar 2015 dan Politik NU dalam Sejarah Kenegaraan

manifestasi tradisi dan budaya setempat yang memiliki hak hidup di republik ini (2015:6).

Bila dikilas balik, semula NU dalam Mukhtamarnya tahun 1936 membicarakan tentang gagasan terkait pendirian negara Indonesia. Pada 1937 K.H Hasyim Asy'ari membentuk gabungan politik Indonesia yang salah satu agendanya mendorong bangsa Indonesia berparlemen.

Era Orde Baru, peran NU dalam pemerintahan cenderung menurun. Sebelumnya, pada tahun 1950-an Partai NU mendudukkan jabatan pada kadernya dalam jabatan strategis, yakni wakil perdana menteri, menteri pertanian, dan menteri agama. Partai NU pun dilebur dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada muktamar ke-27 tahun 1984, NU memutuskan kembali ke khittah (semangat) 1926 dengan keluar dari keterlibatan politik praktis dan menerima sepenuhnya Pancasila sebagai dasar negara. Mukhtamat ke-32 di Makassar dengan tema 'Khidmah Nahdliyin untuk Indonesia Bermartabat'. Tema diusung karena keprihatinan merebaknya paham-paham radikal sehingga dikhawatirkan meredupkan sikap moderat yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia.

2. Mendiskusikan Syariat Islam

Para analis berpendapat bahwa terdapat tiga kelompok yang cenderung atau sikap muslim terhadap penerapan syariat Islam di Indonesia (1) skripturalis yang menginginkan penerapan hukum Islam diformalkan sebagaimana tertulis dalam al-Quran dan Sunnah, seperti hukum *qisas*, potong tangan, rajam dan term lainnya. Dasar yang digunakan adalah pesan an-Nisa:82 "Apakah mereka tidak memperhatikan al-Quran? Jikalau al-Quran bukan berasal dari Allah tentu mereka mendapat pertentangan, pesan al-Ankabuut:51 "Kami (Allah) telah menurunkan kepadamu al-Quran yang terdapat rahmat bagi si mukmin", (2) substansialis bahwa penerapan hukum Islam tidak mesti persis seperti dalam teks al-Quran. *Qisas*, potong tangan, rajam hanyalah alternatif untuk terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Asalkan *maqasid al-syariah* (tujuan diterapkannya hukum Islam) bisa terlaksana, misalnya hukuman penjara menjadi pengganti hukuman potong tangan karena bertujuan membatasi si pelaku, (3) sekuleris yang menginginkan Islam hanyalah sebagai

keyakinan maka hukum Islam tidak berlaku di negara Pancasila.

Paparan ini perlu menyertakan dinamika Islam di Provinsi Aceh yang memiliki qanun. Qanun atau Perda Aceh tentang Hukum *Jinayah* (Pidana) akan diberlakukan terhadap warga muslim yang hidup di Aceh. Hukuman ditimpakan bagi warga yang melakukan perbuatan *jarimah* (dilarang syariat Islam) yakni *khamar* (minuman keras), *maisir* (judi), *khalwat* (sembunyi antara dua orang lain jenis yang bukan mahram), *ikhtilath* (bermesraan antara dua orang lain jenis yang bukan suami-isteri), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf* (menuduh orang berzina tanpa 4 saksi), *liwath* (homoseks), dan *musahaqoh* (lesbi). Sebelumnya, hanya pelaku zina, minum-minuman keras, dan judi. Pelaku *jarimah* mendapat *uqubat* yakni hukuman yang dijatuhkan hakim pada pelaku *jarimah*. Hukuman berupa cambuk atau denda berupa emas atau dipenjara. Wacana mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi G DPR Aceh dan masyarakat membahas Rancangan Qanun Hukum Jinayat dan Raqan Syariat Islam di Banda Aceh Sabtu 6 September 2014. Hal ini amanat UU Pemerintah Aceh Pasal 129. DPR Aceh menyetujui Rancangan *Qanun Jinayat* menjadi UU pada 26 September 2014 setelah diusulkan pada 2012. Hukuman dialami 4 pejudi dihukum cambuk 7 kali per orang di depan umum di halaman Masjid Agung Lampriet, Banda Aceh, Jumat 3 Oktober 2014. Pelaku ditangkap Satpol dan *Wilayatul Hisbah* (Polisi Syariah) Kota Banda Aceh awal Agustus 2014. Polisi menyita satu set kartu poker dan uang Rp 933.000 terbukti melanggar Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* atau Perjudian. Ratusan penonton karena dilaksanakan seusai salat Jumat (*Kompas*, 4 Oktober 2014). Menurut Komisioner Komnas Perempuan Andi Yentriyani, isi qanun terindikasi diskriminatif secara agama dan jender (perempuan). Sejumlah pasal dalam Perda (Qanun tentang Hukum Jinayat dan Qanun tentang pokok-pokok syariat Islam) dinilai kurang sesuai dengan semangat NKRI dan bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Menurut Kepala Dinas Syariah Islam Provinsi Aceh Syahrial Abbas berpendapat bahwa UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan pada Pemerintah Aceh dan DPR Aceh menerapkan syariat Islam. Kedua qanun

Muktamar 2015 dan Politik NU dalam Sejarah Kenegaraan

merupakan turunan dari syariat Islam yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah, yang dijabarkan dalam hukum keluarga, perdata, pidana, peradilan, pendidikan, dakwah, dan pembelaan Islam. Ini bukan kebenaran mutlak tapi ijtihad (hasil pemikiran) para ulama Aceh dengan tujuan kemaslahatan umat (*Kompas*, 6 November 2014).

Muktamar NU ke-27 8-12 Desember 1984 di Situbondo Jawa Timur menghasilkan dua kesepakatan, yakni menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dan mengembalikan NU menjadi organisasi sosial keagamaan sesuai dengan khittah NU 1926 sehingga melepaskan diri dari keterlibatan politik praktis. Rais Aam Syuriah PBNU tahun 1984-1991 K.H Achmad Shiddiq menyatakan, Pancasila merupakan bentuk final perjuangan Islam di Indonesia. Rapat Akbar NU pada 1 Maret 1992 menghasilkan komitmen bahwa warga NU meneguhkan kehidupan kebangsaan dengan pelaksanaan UUD secara baik dan benar. Ketum PBNU Said Aqil Siroj dalam membuka Perkemahan Gerakan Pramuka Penggalang Ma'arif NU Nasional (Pergamanas) di Ponpes Khas Kempek, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 8 Januari 2015 menyatakan, semangat Islam tidak boleh bertentangan dengan semangat kebangsaan atau nasionalisme. Islam dan nasionalisme tidak bisa dipisahkan di Indonesia. Semangat Islam yang kuat tanpa diimbangi rasa kebangsaan yang kokoh akan membawa bangsa Indonesia ke perpecahan dan kehancuran. Semangat Islam saja tanpa disertai nasionalisme belum tentu menghasilkan persatuan bangsa. Negara-negara Timur Tengah yang bergejolak. Afganistan, misalnya, yang sebagian besar warganya Islam Sunni penganut mazhab Hanafi, perang karena tidak memiliki semangat nasionalisme. Begitu pula Somalia, Irak, Suriah, dan Libya seratus persen muslim (*Kompas*, 9 Januari 2015).

Menurut Rofiq, ada empat langkah strategis NU dalam menjaga komitmen kebangsaan guna mengawal NKRI. Pertama, komitmen tentang nasionalisme keindonesiaan yang merupakan ijtihad kebangsaan. Kedua, melalui Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, NU memelopori mempertahankan dan menjaga NKRI ketika Belanda ingin kembali menjajah RI. Ketiga, tahun 1954 menetapkan Presiden Soekarno sebagai pemegang kekuasaan darurat tapi memiliki kekuatan dan itu diterapkan melalui

Konferensi Alim Ulama di Cipanas yang diprakarsai Menag yang juga tokoh NU, KH Ali Masykur. Keempat, NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi (2015:6).

Dalam catatan sejarah, keinginan sebagian muslim pada tahun pertama pascakemerdekaan Indonesia untuk mewujudkan syariat Islam tertuang dalam Piagam Jakarta. Pada 1955 di jalur konstituante yang diwakili Masyumi dan NU berupaya memasukkan nilai Islam untuk tegaknya syariat Islam. Hal ini diawali perjuangan nasionalisme mengusir penjajah terbentuk Boedi Oetomo cerminan nasionalisme, *indische partij* cerminan nasionalisme politik kalangan intelektual radikal, Serikat Dagang Islam cerminan nasionalisme ekonomi yang selanjutnya menjadi Sarikat Islam cerminan *religious political nationalism*, yakni nasional politik religius di kalangan urban Islam yang berakar dalam rural Islam, *Jong Islamieten Bond* gerakan pemuda pelajar dan mahasiswa Islam bertujuan agar Islam tidak lepas di tengah maraknya pendidikan Barat. Gerakan dipelopori KH Agus Salim dan Tjokroaminoto, selanjutnya terbentuk Majelis Islam A'laa Indonesia (MIAI) menjelang Perang Dunia II dan Perang Pasifik. Pada era kolonialisme Jepang, terbentuk Putera (Pusat Tenaga Rakyat) di pimpin Bung Karno dan Bung Hatta mewakili nasionalisme, Ki Hajar Dewantara mewakili nasionalis kultural pedagogis, KH Mansyur mewakili Islam. Pada 1943 Putera dibubarkan diganti *Hookookai* yaitu organisasi kebaktian dipimpin Indonesia dan Jepang, MIAI diganti menjadi Masyumi (Majelis Syuro Muslim Indonesia) untuk perkokoh persatuan umat. Klimaks gerakan syariat Islam dengan dicoretnya 7 kata dalam Piagam Jakarta tatkala dibawa dalam sidang pleno panitia kecil terdiri 9 orang dalam sidang Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) terdiri Soekarno, Muhammad Hatta, AA Maramis, Abikusno Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakkir, Haji Agus Salim, Ahmad Soebardjo, Abdul Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin. Teks 'Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya' dihapus atas usulan Latuharhary (Kristen). Oleh Ki Bagus Hadikusumo menghendaki agar kata 'bagi pemeluknya' dihilangkan dari teks akhirnya menjadi sila pertama Pancasila hingga kini. Dengan demikian, berbeda tetap bersatu sesuai Q.s Al-Maidah:48 "Seandainya Tuhan menghendaki, niscaya kamu

dijadikan-Nya satu umat saja. Tapi Tuhan hendak mengujinya dengan perbedaan. Berlomba-lombalah dengan cara yang baik". Ajaran Islam itu pada tataran realitas kurang mendapat perhatian bagi muslim sendiri yakni kata 'dengan cara yang baik'. Atau pemaknaannya sesuai kepentingan kelompoknya. Dampaknya, perbedaan yang sudah didesain Tuhan menjadi sumber konflik, mengapa? masing-masing individu atau kelompok mengedepankan emosi dan kurang mengutamakan perasaan. Hal yang terjadi adalah keinginan untuk memaksakan diri atau kelompok terhadap keinginannya meskipun bertentangan dengan hati nurani. Bila pemaksaan terbiasa maka yang muncul dalam benaknya adalah terjadi pembenaran yang dipaksakan.

3. Pahlawan dalam NU

Berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) berkat kiprah ulama, antara lain K.H Hasyim Asy'ari (pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, ia dianugerahi gelar pahlawan nasional), K.H Bisri Syansuri pengasuh Ponpes Denanyar, Jombang, dan K.H Abdul Wahab Chasbullah (1888-1971). Abdul Wahab lahir 31 Maret 1888 di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, wafat 29 Desember 1971. Sepulang dari Makkah 1914 Kiai Wahab aktif dalam pergerakan nasional. Pada 1916 mendirikan organisasi pergerakan bernama *Nahdlatul Wathan* (kebangkitan negeri). Pada 1918 bersama K.H. Hasyim Asy'ari mendirikan *Nahdlatut Tujjar* (kebangkitan pedagang) sebagai pusat penggalangan dana untuk perjuangan Islam dan kemerdekaan Indonesia. Merintis majalah dan surat kabar *Berita Nahdlatuol Oelama*, *Oetoesan Nahdlatuol Oelama*, dan *Duta Masyarakat*. Gerakan purifikasi Islam di Hijaz pada 1919 yang hanya memberlakukan satu aliran, yakni wahabi dan pelarangan empat Imam Mazhab, Kiai Wahab menggagas Komite Hijaz. Akan tetapi, komite itu dianggap tak memiliki kekuatan sehingga mendirikan NU 31 Januari 1926 bersama kiai lain. Atas nama NU, Kiai Wahab dan Syekh Ghonaim al-Misri menghadap Raja Saudi Arabia, Raja Abdul Aziz Ibnu Saud. Hasil lobinya, diurungkannya pembongkaran makam Nabi SAW dan diizinkan empat Imam Mazhab, meski belum diizinkan mengajar dan memimpin di Haramain.

Tatkala penjajahan Jepang, Ki Wahab memotivasi pada

para ulama untuk bergabung pada Jawa Hokokai (perhimpunan rakyat Jawa) agar mengetahui apa yang ada dalam Jawa Hokokai. Pada 22 Oktober 1945 dikeluarkanlah fatwa resolusi oleh Rais Akbar PB NU K.H Hasyim Asy'ari di jalan Bubutan VI/2 Surabaya. Saat itu Kiai Wahab menjabat Khatib Aam PB NU. Fatwa resolusi mengilhami arek-arek Suroboyo bertempur pada 10 November untuk mengusir Belanda yang membonceng NICA (sekutu). Sehingga setiap 10 November diperingati Hari Pahlawan. Imbas berjasa merumuskan Resolusi Jihad NU melawan penjajah. Pada 7 November 2014 Kiai Wahab dianugerahi Presiden Jokowi dengan gelar pahlawan nasional bersama tiga tokoh lainnya berdasarkan Kepres Nomor 115/TK/Tahun 2014 tanggal 6 November 2014. Peran Kiai Wahab antara lain memprakarsai Kongres Al-Islam (1923-1926), pendiri NU pada 1926. Kepres ditujukan juga pada Letjend (Purn) Djamin Ginting pejuang dari Tanah Karo, Sumatera Utara tatkala pertempuran Medan Area melawan Inggris dan Gurkha serta melawan pasukan Belanda tatkala melancarkan Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli 1947 dan Agresi II pada 19 Desember 1949. Begitu pula penumpasan gerakan DI/TII. Adapun Sukarni Kartidwirjo merupakan pemuda yang merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan dan pada 16 Agustus 1945 mendesak dan menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok untuk merumuskan proklamasi. Penculikan dilakukan Sukarni tatkala Bung Hatta bersahur agar memproklamirkan kemerdekaan. Sebelumnya, Sukarni pernah menjadi anggota Pengurus Besar Indonesia Muda masa penjajahan Belanda, bekerja di Sendenbu (barisan propaganda). Pada 15 Juni 1945 terlibat membentuk Gerakan Angkatan Baroe Indonesia untuk membangun NKRI. Mayjend Mohamad Mangoendiprojo dari Jawa Timur berjasa pada peristiwa revolusi di Surabaya. Ikut berperan mendesak panglima pertahanan Jepang menyerahkan senjata dan merebut obyek vital di Surabaya pada 1945.

Selain pahlawan nasional dari warga NU tersebut, K.H Muh.Wahib Wahab lahir di Tamakberas Jombang Jawa Timur pada 1 November 1918. Ia tergabung dalam gerakan Pemuda Ansor di Surabaya, gerakan pemuda Islam Indonesia, Ketua Persatuan Tani NU, inisiator perwakilan NU Singapura, Malaysia, Kamboja, Saigo (Vietnam), menjadi anggota Peta (Pembela

Tanah Air), Panglima Hizbullah Devisi Sunan Ampel di Jawa Timur, anggota DPR dan Menteri Penghubungan sipil militer. Pada tahun 1959 menjadi Menteri Agama yang menggantikan K.H Muhamad Ilyas. K.H Wahab setelah menjabat sebagai Menag selama 3 tahun mengundurkan diri karena perbedaan seikap dengan Bung Karno dan diganti oleh K.H Saifuddin. K.H Wahib Wahab dikukuhkan sebagai pahlawan nasional.

K.H Abdul Wahid Hasyim lahir di Jombang 1 Juni 1914 menjabat sebagai Menteri Agama Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949-1950, Kabinet Natsir (1950-1951), Kabinet Sukiman (1951-1952), anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), penandatanganan Piagam Jakarta, Piagam inilah menjadi cikal bakal perumusan Pembukaan UUD 1945. Wahid pernah belajar di Makkah karena kemampuannya dalam berbahasa Inggris, Arab, dan Belanda. Wahid terjun dalam politik dengan menjadi Ketua Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) dan Masyumi, pimpinan Presidium Kongres Rakyat Indonesia (Korindo), tergabung dalam Gabungan Partai Politik Indonesia (GAPI). Wahid aktif dalam politik sejak usia 25 tahun. Ia wafat dalam usia 39 tahun akibat kecelakaan mobil di Cimahi, Jawa Barat. Wahid menjadi Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden RI Nomor 206 Tahun 1964 pada 24 Agustus 1964.

Dalam konteks nasional, nasionalisme Islam kultural yang diwakili NU memberikan makna besar dalam mewujudkan dasar negara yang kokoh. Sebagaimana peran K.H Hasyim Asy'ari yang mengumpulkan ulama se-Jawa dan Madura yang memfatwakan mati syahid bagi pejuang yang tewas dalam melawan Sekutu di era kolonialisme. Hal ini kemudian dikenal sebagai Resolusi Jihad. Seruan ini memicu ribuan pemuda dari seantero Jawa Timur masuk di Surabaya pada 10 November 1945 untuk menghalau Belanda yang akan masuk di Indonesia pasca-hengkangnya Jepang dari Indonesia. Peristiwa itu yang dikenang sebagai Hari Pahlawan. Pada 22 Oktober 1945 para santri ikut berjuang melawan tentara NICA di bawah pimpinan Brigjen AWS Mallaby, Harun, santri Ponpes Tebuireng (Jombang) menaruh bom di mobil Mallaby, sehingga NU mengusulkan tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri.

4. Muktamar NU 2015 di Jombang Jawa Timur

Muktamar NU ke-33 dilaksanakan pada 1-5 Agustus 2015 di Jombang Jawa Timur. Acara di empat pondok pesantren, yakni (1) Bahrul Ulum Tambakberas, didirikan oleh KH Abdus Salam bersama ke-25 santrinya –sehingga disebut pondok selawe- pada 1825. Salam putra Abdul Jabbar, putra Ahmad, putra Pangeran Sumbu, putra Pangeran Benowo, putra Jaka Tingkir (Maskarebet), putra Lembu Peteng Aqilah Brawijaya, (2) Darul Ulum, Rejosari Kecamatan Peterongan, (3) Mambaul Maarif Denanyar, didirikan oleh KH Bisri Syansuri, kakek Gus Dur, pada 1917, dan (4) Tebuireng didirikan oleh KH Hasyim Asy'ari 3 Agustus 1899. Ada 5 sekolah yang berdekatan dengan lokasi muktamar (di sekitar alun-alun) diliburkan selama muktamar, yakni SMKN 2, SMAN 1, SMPN 2, SDN Jombatan III dan IV. Pembukaan dilaksanakan di Alun-alun Jombang oleh Presiden Jokowi.

Muktamar dengan tema 'Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia'. Menurut Fasya, secara historis tema tersebut mengafirmasi aspek historisitas, lokalitas, dan kultur bangsa dalam perjumpaannya dengan Islam. Tema itu tepat karena konflik Timur Tengah ikut berdampak ke Indonesia. Negara Islam di Irak (NIIS) dan kekuasaan Islam dalam satu imperium (*khilafah*) memesonakan sebagian muslim di Indonesia. Penabalan kata 'Nusantara' bukan sekadar penegasan nama tempat tapi yang lebih penting adalah penjelasan adjektiva atau kualitas Islam 'di sini' yang berbeda dengan Islam 'di sana' (Timur Tengah). Sejarah Islam Nusantara ikut memengaruhi peradaban Islam Melayu di Asia Tenggara. Keberhasilan Islam menjadikan Nusantara yang damai tak dapat dilepaskan dari adanya adaptasi dan resiliensi pengetahuan, kesenian, dan kebudayaan lokal (2015:7).

Menurut Indonesianis dan pengamat NU dari Chiba University Jepang Prof. Emeritus Mitsuo Nakamura, ia hadir dalam Muktamar Jombang, Islam Nusantara merupakan khas Indonesia, gabungan nilai teologis dengan tradisi lokal, budaya, dan adat istiadat di Tanah Air. Karakter Islam Nusantara menunjukkan kearifan lokal yang tidak melanggar ajaran agama. Kehadiran Islam tidak untuk merusak atau menantang tradisi yang ada, sebaliknya untuk memperkaya. Islam Nusantara

yang ramah dan toleran dinilai sesuai dengan ajaran para tokoh agama seperti Wali Songo. Di lain pihak, harus diakui bahwa kemunculan gerakan radikal dalam bentuk Islamic State (IS) telah mempengaruhi wajah Islam, bukan hanya di Timur Tengah, melainkan juga di belahan dunia yang lain (*Suara Merdeka.com*, 5 Agustus 2015).

Menurut Azra, salah satu kunci utama keberhasilan Islam di Indonesia memberikan harapan kedamaian karena keberadaan ormas Islam *wasathiyah* (jalan tengah) yang tersebar di seluruh Indonesia. Islam wasathiyah menjadi paradigm dan praksis pokok NU dan Muhammadiyah menjadi tradisi panjang Islam Nusantara (IN). Istilah IN dalam dunia akademik mengacu kepada 'Southeast Asian Islam' yang terdapat di wilayah Muslim Indonesia, Malaysia, Brunei, Patani (Thailand selatan), dan Mindanau (Filipina selatan). IN dalam literature prakolonial disebut 'negeri bawah angin' (*lands below the wind*). Dalam literatur Arab sejak akhir abad ke-16, kawasan Islam Nusantara disebut *bilad al-Jawi*, *ashab al-Jawiiyyin* atau *jama'ah al-Jawiiyyin*, negeri muslim Jawi, yaitu Asia Tenggara. Wilayah IN (*bilad jawiiyyin*) adalah salah satu dari delapan ranah *religio cultural* Islam. Tujuh ranah agama-budaya Islam lain adalah Arab, Persia/Iran, Turki, Anak Benua India, Sino-Islamic, Afrika Hitam, dan Dunia Barat yang masing-masing memiliki karakter keagamaan dan budayanya sendiri.

Pascaperang Dunia II, secara istilah maupun substansi, IN agaknya hanya valid untuk Indonesia yang kini dipahami sebagai Islam Indonesia. Perbedaan posisi dan hubungan Islam dengan Negara dan politik membuat ekspresi Islam di Negara Asia Tenggara menjadi berbeda (tetap inklusif atau eksklusif). Islam tidak menjadi agama resmi atau agama Negara di Indonesia. Oleh karena itu, Islam Indonesia bukan menjadi bagian dari politik dan kekuasaan. Sementara di Malaysia, Islam menjadi agama resmi Negara dan karena itu ia menjadi bagian integral kekuasaan sehingga hanya Islam yang boleh disiarkan di ranah publik. Validitas IN tak hanya secara geografis cultural juga terdiri teologi Asy'ariyah, fikih Syafi'i, dan taSAWuf Al-Ghazali. Kepaduan ketiganya membuat IN menjadi wasathiyah. Teologi Asyariyah menekankan sikap moderasi antara wahyu dan akal, fikih Syafii bergandengan dengan taSAWuf amali/

akhlaki membuat ekspresi Islam menjadi inklusif (tidak tertutup) dan toleran. Ortodoksi Islam Nusantara dengan kepaduan ketiga unsure tersebut terbentuk menjadi tradisi yang terkonsolidasi, mapan, dan dominan sejak abad ke-17 yang kemudian lebih dikenai dengan istilah *ahlus sunnah wal jama'ah* (Sunni). NU menekankan pada tradisi menyebut diri pengikut Aswaja, sedangkan Muhammadiyah menekankan aspek modernisme-reformisme dan ijtihad (2015:6).

Muktamar di Jombang dihadiri 3.500 peserta, yaitu 3.126 orang utusan pengurus cabang NU (tingkat kabupaten/kota) -tiap PCNU 5 orang utusan-, 204 orang utusan pengurus wilayah /PW (provinsi), 100 orang utusan pengurus besar NU/PB (tingkat pusat), dan 70 pengamat. Hadir pula Pengurus Cabang Istimewa (bermarkas di luar negeri) yakni Pakistan, Amerika Serikat, Mesir, Lebanon, Turki, dan Syria. Muktamar dibuka Presiden Jokowi pada Sabtu malam 1 Agustus 2015 di Alun-alun Jombang Jawa Timur, didampingi Rais Aam PBNU KH Mustofa Bisri, Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj, Menag Lukman Hakim Saifuddin, Gubernur Jatim Soekarwo. Ketika membuka, Presiden mengatakan, peran yang diharapkan dari NU, khususnya terkait upaya pengentasan warga dari kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan sosial (3 K). Persoalan itu yang bisa menjadi akar dari gerakan radikalisme. NU agar meningkatkan kerja sama dengan berbagai kalangan guna menciptakan tatanan dunia yang berkeadilan. NU berperan penting menampilkan wajah Islam yang moderat. Sejauh ini, NU telah memberi kontribusi yang besar untuk menjaga Indonesia dan tetap menjadi Indonesia.

Sejarah mencatat, sejak didirikan tahun 1926, NU ikut membidani lahirnya NKRI dan menjaganya dari berbagai ancaman. Terkait tema besar muktamar, yaitu 'Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia' Presiden mendorong agar tema itu dimaknai secara positif bahwa NU dan umat Islam di Indonesia memiliki posisi strategis. Peran umat Islam Indonesia bukan hanya membentuk peradaban bangsa, melainkan juga menjadi inspirasi peradaban dunia. Terkait istilah Islam Nusantara, KH Said Aqil Siraj mengatakan, istilah hanya tipologi, ciri khas berislam orang-orang di Indonesia. Islam Nusantara sama sekali bukan mazhab, *firqoh*, atau aliran

baru. Islam Nusantara merupakan tipologi menjadi ciri khas islamnya orang-orang di Nusantara, yakni laku Islam yang melebur harmonis dengan laku budaya Nusantara yang sesuai syariat (*Kompas*, 2 Agustus 2015). Ada pula yang beranggapan bahwa IN merupakan upaya mengotak-kotak Islam karena Islam untuk seluruh alam semesta, tidak di wilayah/negara tertentu.

Menurut Rumadi, makna strategis Muktamar NU di Situbondo memiliki makna strategis. Pertama, pergantian kepemimpinan nasional (Jokowi sebagai Presiden) NU dituntut mengambil peran dan memastikan pemerintahan berjalan di atas rel yang benar. Kedua, Timur Tengah yang selama ini menjadi kiblat dunia Islam mengalami instabilitas politik. Ketiga, pergeseran geopolitik dan peta aliansi dalam merespon berbagai persoalan sehingga Islam berkembang di Eropa (2015:6). Selanjutnya menurut Misrawi, Pertama, konteks global, NIIS menjadi momok sehingga Islam sebagai rahmatan lil alamin tertampar. Kedua, paradigma Negara Islam tumbuh yang direspon warga. Kedua hal itu bagi NU mencari terobosan untuk menegaskan identitas keislaman yang memberikan harapan bagi Indonesia dan dunia (2015:6).

Pemilihan secara langsung untuk memilih Rais Aam Syuriah dan Tanfidziyah PBNU diterapkan Gus Dur pada Muktamar NU 1984 di Situbondo. Hal itu dilakukan sebagai strategi melawan KH Idham Cholied yang didukung Orde Baru. Muktamar tersebut terpilihnya Ketua Rais Aam Syuriah KH Ahmad Shiddiq dan Ketua Rais Aam Tanfidziyah Gus Dur mengalahkan kelompok Cipete KH Idham Cholied dan Anwar Musyaddad. Selain Muktamar Situbondo 1984 tersebut, pemilihan pemimpin tertinggi NU dengan sistem *ahlu halli wal aqdi*, yakni sistem perwakilan dengan cara menyerahkan kepada anggota yang terdiri 9 tim untuk memilih Ketua Rais Aam. Tujuannya untuk menghindari konflik agar Rais Aam bisa menyelesaikan karena posisinya sebagai pengelola organisasi. Menurut Gus Dur, sistem Ahwa mengadopsi pemerintahan di Inggris, bila Perdana Menteri konflik dengan parlemen maka Ratu Inggris bertindak untuk menyelesaikan konflik dan mengambil alih. Sistem Ahwa diterapkan lagi pada Muktamar NU di Banjarmasin. Dalam demokrasi, terdapat ragam cara menentukan pemimpin yakni langsung dan tidak langsung atau

keterwakilan seperti Ahwa.

4.1 Dinamika Ahwa dalam Mukhtamar Jombang

Dugaan politik uang dilakukan oleh kubu *incumben* yang menyuap muktamirin (peserta mukhtamar) agar mendukung mekanisme Ahwa dengan tarif Rp 15-25 juta. Hal ini dinyatakan oleh mantan Ketua PBNU periode 1999-2010 dan pendukung Gus Solahuddin Wahid Andi Jamaro Dulung Minggu 2 Agustus 2015. Bahkan yang menyetujui Ahwa sebagai syarat mengikuti pendaftaran peserta mukhtamar. Peserta tidak boleh memilih nama tim Ahwa kecuali 9 nama Ahwa yang telah didesain panitia. Bagi yang menolak mekanisme Ahwa, penentuan 9 nama tim Ahwa tersebut dianggap tidak fair (detikcom, 2 Agustus 2015). Dugaan politik uang tersebut ditanggapi As'ad Said Ali bahwa tuduhan tidak benar. Di sisi lain, tidak ditampilkan bukti riil *money politic*. Pengasuh Ponpes Al-Anwar Sarang Jawa Tengah KH Maimun Zubair mengisyaratkan agar NU kembali dipimpin oleh keturunan langsung pendiri NU, KH Hasyim Asy'ari, yang juga kakek KH Solahuddin Wahid. Dalih Maimun, PBNU kini kurang bisa meneruskan ide Mbah Hasyim dan PBNU sulit diarahkan karena ada orang seperti Ulil Abshar Abdalla yang mengilhami jaringan Islam liberal (JIL) dan Islam Nusantara. Hal ini memecah belah NU dari internal. Tantangan NU saat ini, untuk tetap menjadi ormas Islam sejalan dengan gagasan pendirinya (*Republika.com*, 2 Agustus 2015).

PBNU menetralisasi pro-kontra Ahwa, pada 8 Juli 2015 membuat surat edaran (SE) kepada PWNU dan PCNU. SE ditandatangani Pj Rais Aam PBNU KH Mustofa Bisri, Katib Aam PNU KH Malik Madani, Ketum PBNU Said Aqil Siraj, dan Sekjen PBNU Marsudi Syuhud. SE terdapat 4 poin (1) pemilihan Rais Aam pada Mukhtamar ke-33 di Jombang dilaksanakan dengan sistem Ahwa sebagai sistem musyawarah mufakat (Pasal 41 ART NU), (2) Ahwa terdiri 9 ulama dengan kriteria sebagaimana Pasal 2 ayat (4) Keputusan Munas Alim Ulama NU 2015, (3) PW dan PC harus menyerahkan 9 nama Ahwa yang diusulkan saat registrasi peserta mukhtamar, sebagai bagian dari administrasi pendaftaran (Pasal 5 ayat (2) Keputusan Munas Alim Ulama NU 2015), (4) PW dan PC harus memusyawarahkan 9 nama yang akan diusulkan tersebut. Lampiran SE tersebut terdapat nama-

Muktamar 2015 dan Politik NU dalam Sejarah Kenegaraan

nama 39 ulama yang diusulkan dan formulir usulan 9 nama (Republika.online, 2 Agustus 2015).

Sebanyak 29 PWNU sepakat menolak Ahwa, dinyatakan Rois Syuriah PWNU Sulteng KH Jamaluddin Maryajang. Penolakan karena PBNU dan Panitia Muktamar mengirimkan surat yang meminta pengurus PWNU dan PCNU menentukan calon anggota Ahwa dan menyerahkannya di saat registrasi peserta muktamar. PWNU Jateng melayangkan surat edaran yang ditujukan pada semua PCNU di Jateng dan ditembuskan pada PBNU surat Nomor PW/11/375/VII/2015 menyatakan keberatan dan menolak menyerahkan nama calon Ahwa saat pendaftaran peserta muktamar. Surat ditandatangani oleh Rois Syuriah PWNU Jateng KH Ubaidillah Shodaqoh, Ketua Tanfidziyah Abu Hafsini, dan Sekretaris Muhammad Arja. Rois Syuriah PWNU Bengkulu KH Abdul Munir menyatakan bahwa pemaksaan Ahwa merupakan bentuk rekayasa panitia muktamar yang harus ditolak (*Republika.online*, 27 Juli 2015). Sejumlah surat keputusan pengesahan sejumlah PCNU belum ditandatangani PBNU terkait muktamar Jombang untuk mendukung kandidat dari unsur PBNU. PCNU tersebut yakni Kabupaten Solok, Tanah Datar, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Mentawai, SAWahlunto, dan Pesisir Selatan. Begitu pula Maluku, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, dan NTB (*Republika.online*, 31 Juli 2015).

4.2 Pro Ahwa

Forum silaturahmi ulama Jawa Timur di Surabaya dipimpin KH Anwar Iskandar, Rois Syuriah PWNU Jatim yang dihadiri 22 kiai. Ia menyatakan menolak sistem pemilihan Pengurus Rois Aam dan Ketua Tanfidziyah PBNU periode 2015-2020 pada Muktamar NU ke-33 di Jombang melalui cara-cara pemungutan suara (voting). Akan tetapi mengembalikan sistem pemilihan kedua pimpinan PBNU dengan sistem Ahwa atau musyawarah mufakat. Menurut Syaifullah Yusuf, Ketua Panitia Muktamar Daerah di Jombang menyatakan bahwa sistem voting sebagai siasat Muktamar Situbondo yang dibuat Gus Dur agar tidak diintervensi Orde Baru. Konteks selanjutnya sistem voting berakibat buruk dengan menghasilkan firqoh-firqoh atau kelompok/geng. Dengan demikian, Ahwa akan

mengembalikan sistem pemilihan ulama Sembilan orang yang dipilih dalam muktamar dan akan bertindak sebagai formatur yang memilih syuriah (dewan penasehat) dan tanfidziyah (pengurus harian). Mekanisme itu digunakan NU sejak berdiri tahun 1926 hingga Mukhtar Situbondo 1984. Sistem Ahwa untuk menjaga martabat ulama sebagai pemegang amanat tertinggi NU, dipandang lebih *maslahah* (memberi kebaikan), tidak bertentangan dengan AD/ART, dan direstui dalam Munas Alim Ulama NU pada 2 November 2014. Munas merupakan forum tertinggi kedua setelah muktamar (*Kompas*, 31 Juli 2015).

Pro-Kontra mekanisme pemilihan antara Ahwa atau voting memanas sehingga muktamar jadwal agenda dalam muktamar ditunda karena deadlock. Minggu 2 Agustus 2015 malam, muktamar gaduh saat membahas tata tertib muktamar. Pangkal persoalannya adalah pembahasan mekanisme pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU menyebutkan, pemilihan ais aam dan ketua umum dilakukan melalui sistem perwakilan ahwa. Peserta diminta mengusulkan sejumlah nama kiai untuk dipilih menjadi Sembilan anggota Ahwa yang nantinya Ahwa akan memilih rais aam, pemimpin tertinggi jemaah NU. Sebagian peserta menolak sistem Ahwa sejak registrasi peserta muktamar. Panitia mensyaratkan muktamirin mengusulkan 9 nama Ahwa untuk mendapat kartu peserta resmi. Perbedaan ini berlanjut sampai pembahasan tata tertib. Jadwal muktamar pun molor karena registrasi belum selesai.

Pejabat Sementara (Pjs) Rais Aam Syuriah PBNU KH Mustofa Bisri (Gus Mus) -yang melanjutkan kepemimpinan KH Sahal Makhfud karena wafat Januari 2014- berbicara di hadapan muktamirin, Senin 3 Agustus 2015 pada Rapat Pleno di Alun-alun Jombang. Gus Mus bersama kiai sepuh NU mengatasi kegaduhan sejak registrasi peserta. Senin siang, Gus Mus menggelar pertemuan dengan sejumlah kiai sepuh NU dari seluruh Indonesia di Pendopo Kabupaten Jombang. Hasilnya disampaikan Gus Mus saat sidang pembahasan tata tertib mulai dilanjutkan pukul 14.30 Wib. Slamet Effendy Yusuf sebagai pemimpin sidang memberi kesempatan pada Gus Mus.

'Ketika saya mengikuti persidangan-persidangan yang sudah lalu, saya menangis karena NU yang selama ini dicitrakan sebagai organisasi keagamaan panutan, penuh dengan akhlakul

karimah, yang sering mengkritik praktik-praktik tidak terpuji dari pihak-pihak lain, ternyata digambarkan dalam media massa begitu buruk. Sembari bergetar pembicaraannya karena menahan menahan, Gus Mus melanjutkan, Saya malu kepada Allah, malu kepada *hadratussaiikh* Kiai Haji Hasyim Asy'ari, malu kepada Kiai Abdul Wahab Hasbullah, malu kepada Kiai Bisri Syansuri, malu kepada Kiai Romli Tamin, dan pendahulu kita yang mengajarkan kita akhlak rasul. Lebih menyakitkan lagi ketika pagi tadi saya disodori *headline* koran, muktamar NU gaduh'.

Muktamirin diajak *bertawasul*, mengirim doa *La haula wala kuwwata illa billah*. Saya mohon sekali lagi kita membaca surat fatihah dengan ikhlas. Kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad dengan mengharap syafaatnya, kepada keluarga, sahabat-sahabat, tabiit tabiin, aulia, dan ulama, khususnya ulama NU, dan terkhusus rais aam yang membuat saya di posisi seperti ini, (almarhum) Kiai Sahal Mahfudz. Kenapa beliau wafat sehingga saya harus memikul tanggung jawab sebesar ini. Maka, saya pinjam telinga Anda sekalian, sebagai pejabat sementara Rais Aam. Doakan ini adalah terakhir, menjabat jabatan yang tidak pantas untuk saya. Tapi, senyampang itu, saya mempunyai jabatan, Pejabat Sementara Rais Aam, dengarkan saya sebagai pemimpin tertinggi Anda. Kalau tidak, lupakan omongan saya. Kalau perlu, saya mencium kaki-kaki sampeyan semua. Saya akan mencium kaki anda semua, agar Anda memperlihatkan akhlak jamiyah NU, akhlaknya Kiai Hasyim Asy'ari' (*Kompas*, 4 Agustus 2015).

Perdebatan akhirnya diputuskan dalam Rapat Rais Syuriah PBNU di Ponpes Mambaul Maarif, Denanyar, Jombang, Selasa 4 Agustus 2015 pada malam hari bahwa penggunaan Ahwa dalam memilih Rais Aam (Syuriah) yang diputuskan melalui voting. Hasil akhir, 252 anggota Rais Syuriah setuju dengan sistem Ahwa, sedangkan 235 menolak Ahwa, 9 sisanya abstain. Jadi total suara 496. Adapun untuk pemilihan Ketua Tanfidziyah atau Ketua PBNU tetap dilakukan oleh muktamirin (*one man one voot*), bukan dengan mekanisme Ahwa.

Sidang Pleno pemilihan Rais Aam Syuriah NU Rabu 5 Agustus 2015 menghasilkan 9 nama kiai yang duduk di Ahwa, yakni KH Makruf Amin (Jakarta, 333 usulan), KH Nawawi

Abdul Jalil (Sidogiri, 302 usulan), KH Tuan Guru Turmudzi Badrudin (NTB, 298 usulan), KH Khalilurrahman (Kalsel, 273 usulan), KH Dimiyati Rais (Kendal, 236 usulan), KH Ali Akbar Marbun (Sumut, 186 usulan), KH Makhtum Hannan (Cirebon, 162 usulan), KH Maimun Zubair (Rembang, 156 usulan), dan KH Massyubadar (135 usulan). Ke-9 nama tersebut memilih Ketua Rais Aam yang santer dicalonkan yakni KH Musthofa Bisyri, Hasyim Muzadi, dan Maimun Zubair. Akhirnya yang terpilih sebagai Rais Aam adalah Gus Mus dan Ma'ruf Amin sebagai wakil. Gus Mus pengasuh Ponpes Raudlatut Tholibin, Rembang, Jawa Tengah menulis surat dengan huruf Arab Jawi yang ditujukan para *masyayikh* yang menjadi Ahwa. 'Seperti kita ketahui muktamar sekarang ini diwarnai oleh sedikit kisruh yang bersumber pada adanya dua kelompok yang masing-masing menginginkan jagonya yang menjadi rais aam. Satu berusaha mempengaruhi muktamirin untuk memilih A, satunya lagi B dan sistem Ahwa pun dianggap sebagai alat oleh salah satu kelompok tersebut. Oleh karena itu, demi kemaslahatan jamiyah dan sekaligus mengayomi kedua belah pihak yang berasing tersebut, sebaiknya Ahwa tidak memilih dua nama yang dijagokan kedua belah pihak tersebut. Jabatan Rais Aam biarlah diserahkan kepada salah satu dari Ahwa yang paling mendekati kriteria paling sepuh dan alim fikih yakni KH Maimoen Zubair. Mbah Moen pun menolak (*Kompas*, 7 Agustus 2015).

Sidang Pleno pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah Periode 2015-2020 dilaksanakan Rabu malam 5 Agustus 2015 dan selesai 6 Agustus dini hari. Muktamirin yang hadir di tempat pemilihan 378 orang dari 508 peserta. Mekanisme pemilihan dengan dua tahap. Tahap pertama penjaringan bakal calon untuk mengusulkan nama calon. Tahap kedua, pencalonan. Calon yang berhak mengikuti pencalonan harus mengantongi dukungan minimal 99 suara. Proses pemilihannya, peserta dipanggil pemimpin sidang sebanyak 8 orang berdasarkan wilayah, peserta mengisi daftar hadir di meja awal pemungutan, petugas akan melubangi identitas pemilik suara untuk ditukar dengan kartu suara, peserta memilih di meja pemungutan, peserta memasukkan kartu ke kotak suara, dan peserta kembali ke tempat semula. Said Aqil mendapat suara 287, As'ad Said Ali 107 suara, Salahuddin Wahid 10, Hilmi Muhammad 3, Said

Muktamar 2015 dan Politik NU dalam Sejarah Kenegaraan

Halan dan Adnan masing-masing 1 suara. Sesuai ketentuan, minimal 99 dukungan untuk melaju pada tahap berikutnya sehingga Said dan As'ad yang berhak melaju tahap berikutnya. Akan tetapi, As'ad menyatakan mundur dalam putaran kedua dan mendukung Said. Ahmad Muzakki yang memimpin sidang pleno membacakan surat dari Mustofa Bisri yang tidak bersedia menjadi Rais Aam Syuriah sebagaimana hasil keputusan Ahwa. Tim Ahwa akhirnya Kamis 6 Agustus 2015 pukul 02.10 Wib memutuskan Ma'ruf Amin menjadi Rais Aam Syuriah PBNU 2015-2020. Said berjanji memprioritaskan pemerataan program kerja hingga ke luar Jawa, mengawal aswaja, yaitu Islam yang moderat, toleran, dan *balance*. Akibat mundurnya jadwal penutupan muktamar maka Wapres Jusuf Kalla urung menutupnya.

Salah satu agenda Munas Ulama dan Konferensi Besar NU di Kaliurang Yogyakarta 30 Agustus-3 September 1981 adalah pembaiatan Rais Aam PBNU yang baru sejak KH Bisri Syansuri wafat 30 April 1980. Hampir setahun pascawafat tersebut, jabatan rais aam dibiarkan kosong karena pengisian jabatan tidak sederhana. Munas memilih KH Ali Maksum pengasuh Ponpes Krapyak Yogyakarta menjadi rais aam yang dibaiat oleh KH Anwar Musyaddad dari Garut, Wakil Rais Aam. KH Ali Maksum berkenan karena ajakan KH Idham Chalid, Ketua Umum PBNU. Setelah dibaiat menangis sesenggukan, Ali Maksum menyatakan "*Inni qad wullitu alaikum walastu bi khoirikum. Idza raaitun fiyya l'wijajan fa qawwimuny wa'jiluny watharahuny fi al-mazbalah'* sesungguhnya aku telah diberi kepercayaan darimu, padahal aku bukanlah yang terbaik darimu. Oleh karena itu, jika kamu melihatku melenceng maka luruskanlah aku, hindarkanlah aku dari kesalahan, dan tegurlah aku sampai ke tempat yang baik. Kealiman, kesederhanaan, keikhlasan, dan keistikamahan ulama dan kiai merupakan karakter kiai NU. Menurut Amir, kiai berebut 'tidak mau' dipilih memangku jabatan. Muktamar di Jombang terjadi perubahan dan erosi di lingkungan nahdliyin. Mengapa ricuh? (2015:6).

4.3 Kritik Era Kepemimpinan Said Aqil dan Kemenangan Jabatan Kedua

Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail PBNU KH

Cholil Nafis memberikan catatan tentang kepemimpinan KH Said Aqil (2010-2015). Said selaku Ketua Syuriah PBNU tanpa sepengetahuan Rais Aam KH Sahal Makhfud pada 27 Oktober 2011 bekerja sama dengan Universitas al-Musthofa, Qom, Iran di bidang pendidikan, riset, kebudayaan selama 4 tahun. Nafis menyimpan salinan MoU-nya. NU juga menjadi sasaran penyebaran paham Syiah, Wahabi, Hizbut Tahrir, dan Islam Liberal (*Jawa Pos.com.*, 4 Agustus 2015). Ada 25 Pengurus Wilayah NU menolak laporan pertanggungjawaban (LPj) PBNU periode 2010-2015 dan menolak terpilihnya Said pada periode 2015-2020. LPj yang dalam laporannya dipimpin Sekjen PBNU Marsudi Suhud. Lazimnya LPj ada pandangan umum, tetapi dalam laporan tersebut tanpa pandangan umum dan terkesan dipaksakan diterima peserta muktamar. Ke-25 PWNU menunjuk Taufiqurrahman Saleh (mantan anggota DPR asal Lamongan) sebagai kuasa hukum untuk mengajukan gugatan atas sejumlah pelanggaran dalam muktamar. Akibat dari mempersulit muktamirin dari awal pendaftaran dan banyaknya manipulasi. Menurut Rais PWNU Sulteng Jamaluddin Maryajang, luapan kekecewaan setelah sidang pleno pemilihan Ahwa berubah menjadi sekedar pengumuman anggota Ahwa dengan orang-orang yang sudah ditentukan. Padahal para rais syuriah sudah diverifikasi untuk masuk ruang sidang guna memilih. Selama hampir 2 jam dibatalkan pemilihan dan langsung diumumkan anggota Ahwa tanpa pemilihan oleh para rais yang tanpa alasan jelas. Ahwa yang ditunjuk hanyalah usulan dari sebagian kecil PW dan PC yang dipaksa mengisi blangko isian anggota Ahwa pada saat registrasi tanpa mengakomodasi usulan PW dan PC (*Suara Merdeka*, 7 Agustus 2015).

Pengasuh Ponpes Al-Anwar Sarang, Rembang, Jateng KH Maimun Zubair menegaskan bahwa hasil Muktamar Jombang adalah sah secara hukum dan mengikat. Generasi Muda NU (GMNU) agar terjadi islah/damai. Menurut Kepala Satkorwil Banser Jateng Hasyim Asyari dan kader NU, mantan Ketua MK Mahfud MD berharap sama (*Suara Merdeka*, 10 Agustus 2015). PWNU Jateng membatalkan rencana gugatan terhadap Panitia Muktamar Jombang. Hal ini terjadi setelah Pengasuh Ponpes Al-Itqon, Bugen, Tlogosari, Semarang KH Kharis Shodaqoh bertemu dengan Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah

Ubedullah Shodaqoh dan Ketua PWNU Jateng Abu Hapsin. Pertimbangan mengurungkan gugatan karena agar keadaan kembali baik. Hasil muktamar harus diterima dan konsentrasi kepada umat (*Suara Merdeka*, 13 Agustus 2015). Akan tetapi, Forum PWNU menggugat pelaksanaan dan hasil mukatamar ke pengadilan berdasarkan kesepakatan 29 PWNU sebagai tindak lanjut penolakan hasil muktamar. FPWNU berharap agar Kemendagri tidak mengakui dahulu kepengurusan baru. Hal ini dinyatakan Ketua PWNU Banten Makmur Masyhur (*Suara Merdeka*, 24 Agustus 2015). Pada pertengahan September 2015 menurut agenda, gugatan disidangkan di PTUN Jakarta. Hingga ditulisnya naskah ini, upaya FPWNU belum diperoleh hasilnya oleh penulis.

4.4 Susunan Kepengurusan PBNU Periode 2015-2020

PBNU pada Sabtu 22 Agustus 2015 mengumumkan struktur kepengurusannya dan pengukuhannya dilakukan oleh Wapres Jusuf Kalla di Masjid Istiqlal Jakarta, Sabtu 5 September 2015. Pengukuhan bagi sebageian nahdliyin dianggap hal baru karena PBNU merupakan pengurus tertinggi sehingga tak ada pihak yang berwenang mengukuhkan.

Mustasyar: K.H Maemun Zubair, K.H Mustofa Bisri, K.H Nawawi Abdul Jalil, K.H Abdul Muchit Muzadi, K.H Tholhah Hasan, K.H Dimiyati Rois, K.H Makhtum Hanan, K.H Muhtadi Dimiyathi, AGH Sanusi Baco, TGH Turmudzi Badruddin, K.H Zaenuddin Djazuli, K.H Abdurrahman Musthafa, K.H M. Anwar Manshur, K.H Habib Lthfi bin Yahya, K.H Sya'roni Ahmadi, K.H Ahmad Syatibi, K.H Syukri Unus, H.M Yusuf Kalla, Chotibul Umam, Tengku H. Muslim Ibrahim, K.H Hasbullah Badawi, K.H Hasyim Wahid, K.H Thohir Syarqawi Pinrang, K.H Hamdan Kholid, K.H Saifuddin Amsir, K.H Zubair Muntashor, K.H Ahmad Basyir, K.H Ahmad Shodiq, K.H Mahfud Ridwan, K.H Nasaruddin Umar, H. Machasin, K.H Adib Rofiuddin Izza, Habib Zein bin Smith, dan Awang Faroeq Ishaq. **Pengurus Harian Syuriah: Rais Aam** K.H Maruf Amin, **Wakil Rais Aam:** K.H Miftahul Akhyar. Rais: K.H Mas Subadar, K.H Nurul Huda Djazuli, K.H Masdar Farid Mas'udi, K.H Ahmad Ishomuddin, K.H AR Ibnu Ubaidillah Syatori, K.H Dimiyati Romli, K.H Abdullah Kafabihi Mahrus, K.H Khalilurrahman, K.H Syarifuddin Abdul Ghani, K.H Ali Akbar

Marbun, K.H Subhan Makmun, K.H M. Musthofa Aqil Siroj, K.H Cholil As'ad Samsul Arifin, K.H Idris Hamid, K.H Akhmad Said Asrori, K.H Abdul Hakim, K.H Zakki Mubarak, K.H Maskuri Abdillah, K.H Najib Abdul Qadir. Katib Aam: K.H Yahya Cholil Staquf, Katib: K.H Mujib Qulyubi, K.H Salahuddin al-Ayyubi, K.H Abdul Ghafur Maemun, K.H ZUlfa Musthafa, H.Asrorun Niam Shaleh, K.H Acep Adang Ruchiyat, K.H Lukman Hakim Haris, K.H Taufiqurrahman Yasin, K.H Abdussalam Shohib, K.H Zamzami Amin, H. Sa'dullah Affandy. **A'wan:** K.H Abun Bunyamin Ruchiyat, K.H Cholid Mawardi, K.H TK Bagindo M Letter, H.M Ridwan Lubis, K.H Mukhtar Royani, K.H Abdullah Syarwani, K.H Eep Nuruddin, K.H Nuruddin Abdurrahman, K.H Ulinnuha Arwani, K.H Abdul Aziz Khayr Afandi, H Fauzi Nur, K.H Hilmi Muhammadiyah, K.H Maulana Kamal Yusuf, K.H Ahmad Bagja, K.H Muadz Thohir, K.H Maimun Ali, H.Imam Mudzakir, H.Ahmad Ridlwan, H. Taher Hasan, Hj. Sinta Nuriyah, Hj. Mahfudhoh Ali Ubaid, Hj. Nafisah Sahal Mahfudh, Hj.Chuzaimah T.Yanggo, Hj. Faizah Ali Sibromalisi, Hj.Ibtisyaroh, Hj. Sri Mulyati. **Pengurus Harian Tanfidziyah:** Ketua Umum: K.H Said Aqil Siroj, Wakil Ketua Umum: H.Slamet Effendy Yusuf. Ketua: H.Saifullah Yusuf, H.Marsudi Syuhud, M.Nuh, M.Maksum Machfoed, K.H Abbas Muin, K.H Imam Aziz, H.Farid Wajdi, Muh.Salim Al-Jufri, K.H Hasib Wahab, H. Hanief Saha Ghafur, K.H Abdul Manan Ghani, K.H Alizzuddin Abdurrahman, H.Nusron Wahid, H.Eman Suryaman, Robikin Emhas, H.M. Iqbal Sullam, H.M. Sulthonnnnnnnn Fatoni. **Sekjen:** H.A.Helmy Faishal Zaini, **Wasekjen:** H.Andi Najmi Fuaidi, H.Syahrizal Syarif, H.Masduki Baidlowi, H.Abdul Mun'im DZ, Ishfah Abidal Aziz, H.Imam Pituduh, Suwadi D. Pranoto, H.Ulil A.Hadrawi, H.M Said Aqil, Sultonul Huda, Aqil Irham, Heri Haryanto. **Bendahara Umum:** H.Bina Suhendra. **Bendahara:** H. Abidin, H.Bayu Priawan Joko Sutono, H.Raja Sapta Ervian, H.Nurhin, H.Hafidz Taftazani, Umarsyah HS, N.M. Dipo Nusantara Pua Upa.

Struktur kepengurusan tersebut bila kita memahami kancah pra-pemilihan di tengah suasana Mukhtar Jombang, tak seorang pun yang saat itu lebih condong memilih calon Ketua Tanfidziyah Gus Solah (Solahuddin Wahid) terakomodasi dalam kepengurusan periode 2015-2020. Bahkan, dominasi

Muktamar 2015 dan Politik NU dalam Sejarah Kenegaraan pengurus inti dipegang oleh orang yang sedang di partai politik.

C. Penutup

Kiprah NU secara kelembagaan dan personilnya dalam perpolitikan nasional memberi makna dalam tegaknya Negara Kesatuan RI (NKRI), meskipun dinamika berpolitik NU menjadi telaah yang tak akan habis dibahas. Mengkaji NU juga menarik dalam konteks Muktamar tahun 2015 di Jombang dengan diberlakukannya sistem *Ahlul Halli wal Aqdi* (Ahwa). Imbas Ahwa yang diawali pro-kontra hingga muktamar berakhir masih menyisakan persoalan yang harus diselesaikan dengan tangan dingin. Berpolitik, apa pun ormasnya sangat rentan dijadikan tumbal politik. Hal ini identik dengan kubu-kubuan. Bagi kubu yang berkuasa dan tidak mengakomodasi kubu lain maka memunculkan embrio konflik baru. Hal ini tercermin dalam struktur kepengurusan PBNU Periode 2015-2020 yang sarat dengan pos dari politisi, seperti Sekjen PBNU semula fungsionaris PKB. Dengan demikian, NU dalam realitasnya tidak bisa atau tidak mampu melepaskan urat nadi politik praktis meski berorganisasi identik dengan perpolitikan, tapi *non-political real*. Hal ini menarik untuk ditelaah lanjut. Akar utama NU-Politik diawali sejak berdirinya untuk membangun bangsa yang majemuk tidak bisa terlepas dari perpolitikan. Jengahnya NU dalam politik praktis maka diwujudkan kembali ke khittah NU 1926. Akan tetapi, bila *khittah* tersebut tidak diimbangi dengan semangat untuk mewujudkannya dengan cara membentengi kepentingan pihak politisi partai maka kembali *khittah* akan berubah menjadi NU semi politik kepartaian. Bila berpolitik, upaya membangun warga NU semakin tak terwujud di tengah kemiskinan dan keterbelakangan warga jemaahnya.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Rumadi. *NU, dari Nusantara untuk Dunia*. Kompas, 31 Juli 2015.
- Amir, Saliyun Moh. *Tangisan Rais Aam*. Suara Merdeka, 6 Agustus 2015.
- Azra, Azyumardi. *Islam Indonesia Berkelanjutan*. Kompas, 1 Agustus 2015.
- Fasya, Teuku Kemal. *Dimensi Puitis dan Kultural Islam Nusantara*. Kompas, 4 Agustus 2015.
- Halim, Abdul. *Aswaja Politisi NU Perspektif Hermeneutika Gadamer*. LP3ES: Jakarta. 2014.
- Misrawi, Zuhairi. *Meneguhkan Islam Nusantara*. Kompas, 1 Agustus 2015.
- Qodir, Zuly. *Sosiologi Politik Islam Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2012.
- Rofiq, Ahmad. *Kembali ke Spirit Kebangkitan Pemikiran*. Suara Merdeka, 4 Agustus 2015.
- Rosyid, Moh. *NU dan Politik Toleransi*. Radar Kudus, Jawa Pos Kolom Cermin Hati, Jumat 16 Mei 2014.
- Umar, Nasaruddin. *Teologi PBNU*. Kompas, 1 Agustus 2015.